

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu yang perlu dikaji dalam pembangunan ekonomi. Secara umum, ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana distribusi pendapatan di dalam suatu masyarakat tidak merata, sehingga terdapat kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketimpangan didefinisikan merupakan keadaan yang tidak wajar atau mencerminkan ketidakadilan. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai keadaan dimana distribusi pendapatan pada suatu daerah tidak merata atau tidak terdistribusi secara adil dalam masyarakat.

Pengurangan ketimpangan pendapatan juga tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan 10 (*Reduced Inequalities*) yang menargetkan pengurangan kesenjangan di dalam maupun antarnegara. Selain itu, upaya mengurangi ketimpangan turut mendukung pencapaian tujuan 1 (tanpa kemiskinan) dan tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) karena distribusi pendapatan yang lebih merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pengurangan ketimpangan pendapatan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan antarwilayah, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta penguatan sistem perlindungan sosial (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan dampak lanjutan yang berpotensi serius terhadap keberlanjutan pembangunan, terutama dalam sektor ekonomi. Berdasarkan penelitian Maesza *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa Ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap berbagai aspek mulai dari individu, keluarga, hingga kondisi sosial dan ekonomi secara luas. Semakin besar kesenjangan pendapatan, semakin tinggi pula resiko munculnya berbagai permasalahan sosial.

Mengukur ketimpangan pendapatan menggunakan indikator Indeks gini. koefisien gini yang tinggi menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi, sedangkan nilai koefisien gini yang rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, (Julihanza, 2023). Nilai Indeks gini berkisar antara 0 hingga 100, nilai 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sempurna, sedangkan

nilai 100 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi nilai Indeks gini maka ketimpangan pendapatan semakin besar dan sebaliknya semakin rendah nilai Indeks gini maka semakin merata distribusi (Sugiarti & Erdkhadifa, 2023).

Data ketimpangan pendapatan yang bersumber dari World Bank disajikan dalam skala (0-100) sebagai hasil konversi dari koefisien gini (0-1) dengan tujuan memudahkan interpretasi. Menurut penelitian Sitthiyot & Holasut, (2020) menyatakan bahwa skala ini mempermudah pembacaan perubahan ketimpangan dalam bentuk persentase.

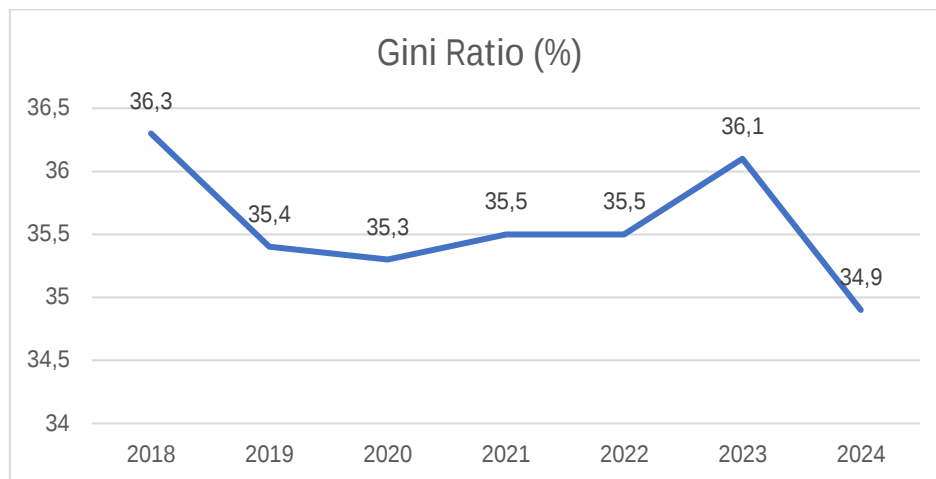
Fenomena Indeks gini menunjukkan berbagai permasalahan struktural yang masih dihadapi di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Selain itu, ketimpangan juga terlihat antarprovinsi, khususnya antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran, serta ketimpangan akses terhadap teknologi dan infrastruktur turut memperburuk kondisi ini.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan distribusi bantuan sosial belum sepenuhnya efektif dalam menekan ketimpangan secara signifikan (Agussalim *et al.*, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan kebijakan publik.

Berdasarkan data World Bank, Rasio Gini di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola naik-turun khususnya pada periode pasca pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia belum stabil dan masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Faktor-faktor seperti ketimpangan akses pendidikan, perbedaan produktivitas tenaga kerja, urbanisasi serta dampak globalisasi dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia (Ismawati *et al.*, 2026).

Di sisi lain, ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, namun juga merupakan fenomena global yang terjadi di negara maju. Meskipun negara maju umumnya memiliki sistem ekonomi yang lebih mapan serta kebijakan redistribusi yang lebih kuat, ketimpangan tetap terjadi akibat faktor seperti globalisasi, perubahan teknologi, dan pergeseran pasar tenaga kerja.

Beberapa negara maju bahkan mengalami peningkatan ketimpangan dalam beberapa dekade terakhir, terutama akibat konsentrasi pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi serta stagnasi pendapatan kelas menengah, Kang (2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin pemerataan pendapatan yang merata, serta upaya peningkatan kesejahteraan juga harus dilakukan melalui beragam pendekatan yang berfokus pada perbaikan distribusi pendapatan dari berbagai sektor yang ada (Kalalo *et al.*, 2016). Berikut perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada Tahun 2018-2024.



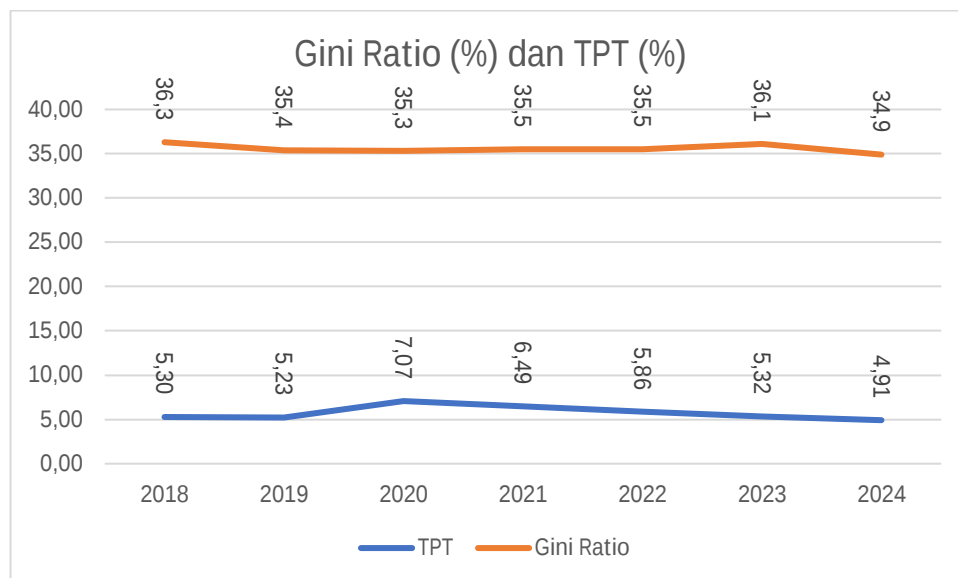
Gambar 1. 1 Perkembangan data Gini Ratio di Indonesia Tahun 2018-2024

Sumber: World Bank, 2025

Dari gambar 1.1 tersebut, Kondisi gini ratio di Indonesia selama kurun waktu 2018-2024 menunjukkan pola fluktuasi. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan dari 36,3% hingga 35,4%. Namun pada tahun 2019 hingga tahun 2022 gini ratio di Indonesia stagnan dipengaruhi oleh ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta dinamika kondisi global. Pada tahun 2023 gini ratio kembali meningkat menjadi 36,1%.

Pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 34,9% seharusnya mengikuti pola kurva U terbalik, yaitu meningkat lalu menurun secara bertahap. Penurunan tajam pada periode 2024 menunjukkan bahwa karena adanya intervensi kebijakan dan faktor eksternal yang mempercepat perubahan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika ketimpangan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebijakan, bukan semata-mata oleh tahapan pembangunan ekonomi (Dabla-Norris *et al.*, 2015).

Rendah dan naiknya pendapatan seseorang salah satunya dipicu oleh ketiadaan pekerjaan atau pengangguran. Menurut Sejati, (2020) pengangguran merujuk pada kondisi individu dalam usia produktif yang tidak bekerja atau tidak menghasilkan pendapatan. Dalam klasifikasinya, terdapat istilah pengangguran terbuka (*open unemployment*) yang menggambarkan angkatan kerja yang benar-benar tidak bekerja. Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Ratio di Indonesia pada Tahun 2018-2024



Gambar 1. 2 Perkembangan data jumlah TPT & Gini Ratio di Indonesia Tahun 2018-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & World Bank, 2025

Dari gambar 1.2 tersebut Perkembangan Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran terbuka di Indonesia selama kurun waktu 2018–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berada pada tahun 2020 sebesar 7,07 % akibat dampak pandemi COVID-19, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 4,91% pada tahun 2024.

Berdasarkan pada teori pasar tenaga kerja dalam ekonomi neoklasik dan distribusi pendapatan. Teori ini menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan karena sebagian individu tidak memperoleh pendapatan dari pekerjaan, sehingga memperlebar perbedaan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Selain itu, pengangguran juga dapat menurunkan daya tawar tenaga kerja, sehingga berdampak pada stagnasi upah bagi kelompok berpenghasilan rendah (Ahmed, 2026).

Fenomena terjadi pada tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2020 TPT sebesar 7,07% dan gini ratio sebesar 35,3%. Peningkatan (TPT) tidak diikuti kenaikan ketimpangan, melainkan terjadi penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya bantuan sosial dan stimulus pemerintah yang mampu menjaga pendapatan kelompok bawah, sehingga menahan peningkatan ketimpangan (Suryadarma, 2020). Selain itu pandemi juga menurunkan pendapatan kelompok atas sehingga ketimpangan relatif mengecil.

Pada tahun 2021 TPT sebesar 6,49% dan gini ratio sebesar 35,5%. meskipun pengangguran menurun, ketimpangan justru meningkat. Kondisi ini muncul akibat pemulihan ekonomi yang tidak merata, dimana kelompok berpendapatan tinggi lebih cepat pulih dibandingkan kelompok berpendapatan rendah sehingga memperlebar kesenjangan (Ismawati *et al.*, 2026).

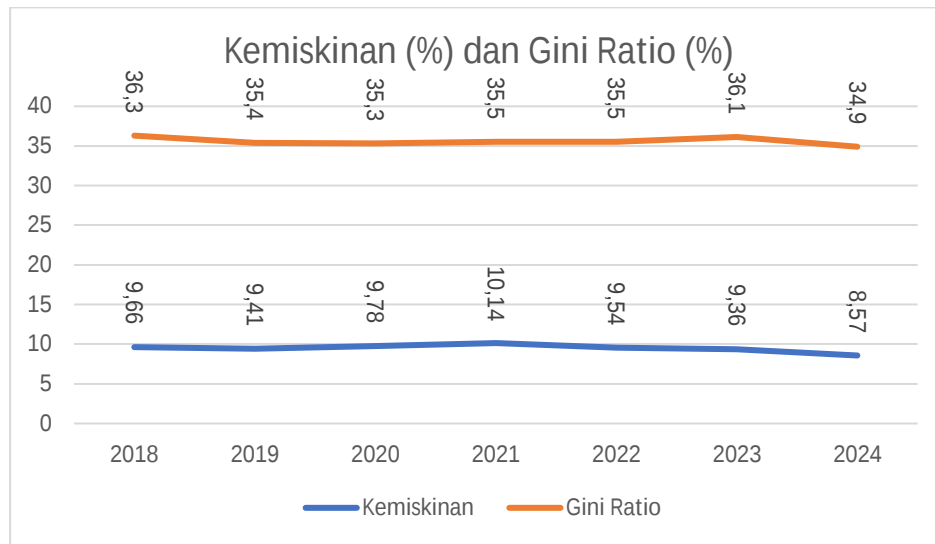
Pada tahun 2022 TPT sebesar 5,86% dan gini ratio sebesar 35,5%. Penurunan pengangguran tidak diikuti perubahan signifikan pada ketimpangan yang cenderung stagnan. Hal ini disebabkan oleh dominasi pekerjaan di sektor

informal dengan upah rendah, sehingga peningkatan kesempatan kerja tidak cukup meningkatkan distribusi pendapatan secara merata (Ismawati *et al.*, 2026).

Penelitian Rozaki & Afiatno, (2024) menjelaskan bahwa kenaikan tingkat pengangguran menyebabkan rumah tangga berpendapatan rendah kehilangan sumber nafkah utama, sehingga distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata dan kesenjangan ekonomi pun melebar. Penelitian Dabla-Norris *et al.*, (2015) menemukan bahwa kenaikan tingkat pengangguran memiliki korelasi positif dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan, khususnya di negara-negara berkembang, karena dampaknya lebih besar dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah.

Selain tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Menurut Fosu, (2017) di negara-negara berkembang termasuk di Asia, tingginya tingkat kemiskinan umumnya berhubungan langsung dengan meningkatnya ketidakmerataan distribusi pendapatan, disebabkan terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan yang memadai, modal dan kesempatan kerja sehingga distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Apabila jumlah penduduk miskin meningkat, maka kesenjangan antara kelompok berpendapatan rendah dan kelompok berpendapatan tinggi cenderung semakin terlihat. Tingginya angka kemiskinan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya ketimpangan pendapatan (Nurfadila & Intan, 2023). Berikut perkembangan Kemiskinan (Juta Jiwa) dan Gini Ratio di Indonesia pada Tahun 2018-2024



Gambar 1. 3 Perkembangan data Kemiskinan & Gini Ratio di Indonesia Tahun 2018-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & World Bank 2025

Dari Gambar 1.3 tersebut tahun 2018–2024, terlihat fluktuasi antara tingkat kemiskinan dan gini ratio. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun pada tahun 2018 sebesar 9,66% menjadi 8,57% pada tahun 2024, namun mengalami lonjakan pada tahun 2021 menjadi 10,14% akibat pandemi COVID-19.

Menurut Teori Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953). Teori tersebut menyatakan bahwa kemiskinan terjadi dalam suatu siklus yang berkelanjutan dan saling memengaruhi. Pendapatan yang rendah mengakibatkan kemampuan menabung dan berinvestasi menjadi terbatas, sehingga produktivitas tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut kemudian memperbesar kesenjangan pendapatan dan mempertahankan kemiskinan dalam jangka panjang.

Fenomena data di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori tersebut pada beberapa periode. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan meningkat tajam dari 9,41% menjadi 9,78% tetapi Gini Ratio justru menurun dari 35,4% menjadi 35,3%. Fenomena ini juga terlihat pada periode 2021–2022, di mana kemiskinan masih relatif tinggi, namun ketimpangan cenderung stabil. Secara teori, peningkatan kemiskinan seharusnya diikuti oleh peningkatan ketimpangan, tetapi data menunjukkan arah yang berbeda.

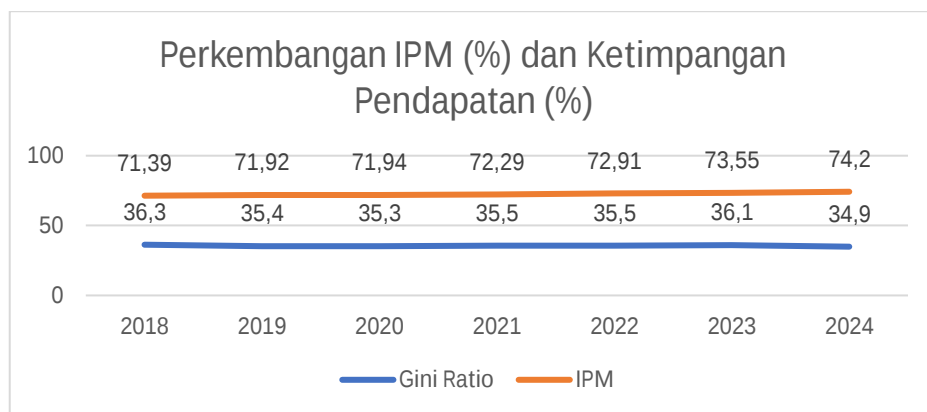
Selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan pendapatan yang relatif merata, terutama pada kelompok menengah dan atas, sehingga ketimpangan tidak meningkat meskipun kemiskinan bertambah. Selain itu, program bantuan sosial pemerintah turut menjaga daya beli masyarakat miskin sehingga mampu menahan peningkatan ketimpangan (Suryadarma, 2020).

Fenomena menarik lainnya terjadi pada tahun 2023, di mana tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,36%, tetapi ketimpangan justru meningkat menjadi 36,1%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan. Menurut World Bank (2023) dan *OECD* (2021), kondisi tersebut dapat terjadi ketika pertumbuhan ekonomi lebih banyak dirasakan bagi kelompok berpendapatan tinggi, sehingga kesenjangan tetap melebar meskipun jumlah penduduk miskin berkurang.

Ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencerminkan capaian pembangunan manusia yang diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak Sugiarti & Erdkhadifa, (2023). IPM diyakini berkaitan dengan tingkat ketimpangan pendapatan karena

semaakin tinggi nilai IPM suatu daerah atau negara maka kualitas sumber daya manusia secara umum akan semakin baik, sehingga sebagian penduduk berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat menekan atau mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah dan negara tersebut

Menurut Khadijah *et al.*, (2022), IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai dan membandingkan mengetahui perbedaan kinerja pembangunan manusia antarwilayah atau antarnegara. Pengukuran IPM menjadi penting karena kualitas sumber daya manusia berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu negara dan daerah sehingga dapat mendukung kemajuan dan pembangunan wilayah tersebut. Oleh sebab itu, sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Berikut data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) & Gini Ratio di Indonesia pada Tahun 2018-2024:



Gambar 1. 4 Perkembangan data IPM & Gini Ratio di Indonesia Tahun 2018-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & World Bank, 2025

Dari Gambar 1.4 tersebut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selama kurun waktu 2018–2024 menunjukkan kecenderungan

meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018, IPM tercatat 71,39 poin dan terus mengalami kenaikan menjadi 71,92 poin pada 2019 serta 71,94 poin pada 2020. Meskipun terjadi perlambatan akibat pandemi, IPM tetap meningkat menjadi 72,29 point pada 2021 dan 72,91 poin pada 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada 2023 sebesar 73,55 poin dan terus naik hingga mencapai 74,2 poin pada 2024. Secara umum, tren ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas SDM di Indonesia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Menurut *Human Development Theory* yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999). Teori ini menekankan bahwa pembangunan seharusnya berfokus pada perluasan kapabilitas manusia (*capability expansion*), seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Dalam kerangka ini, peningkatan IPM diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena masyarakat memiliki kesempatan yang lebih merata untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Sen (1999) dalam karyanya *Development as Freedom* menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia akan memperluas peluang ekonomi dan mengurangi disparitas sosial ekonomi.

Fenomena IPM di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan data terjadi pada periode 2022–2023, di mana IPM meningkat dari 72,91 poin menjadi 73,55 poin, tetapi Gini Ratio justru meningkat dari 35,5% menjadi 36,1%. Fenomena tersebut bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa naiknya IPM dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian oleh Aulia & Pratomo, (2025) menunjukkan bahwa meskipun IPM meningkat, distribusi manfaat pembangunan seringkali tidak merata akibat

perbedaan kualitas pendidikan dan kesehatan antar kelompok masyarakat. Wulandari *et al.*, (2026) menemukan bahwa faktor struktural seperti urbanisasi dan konsentrasi ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan tetap tinggi meskipun IPM meningkat. Penelitian (Rohmawati *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan distribusi bantuan sosial yang belum optimal. Bina *et al.*, (2025) ketimpangan pasar tenaga kerja dan perbedaan produktivitas menjadi penyebab utama ketimpangan tetap tinggi meskipun kualitas manusia meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Karimi *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ashari *et al.*, (2024) menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Sementara itu, Penelitian Agape *et al.*, (2022) yang menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* (FEM) pada 18 provinsi di Indonesia selama kurun waktu 2019-2020 menemukan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Penelitian Firdaus & Hasmarini, (2023) yang menggunakan data panel provinsi Bali kurun waktu 2015-2022 dengan pendekatan REM (*random effect model*) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Keterbaruan penelitian ini tereletak pada cakupan periode pengamatan yang lebih panjang, yaitu dari tahun 1994-2024. Rentang waktu tersebut memungkinkan analisis yang mencakup berbagai fase perkembangan ekonomi Indonesia, mulai dari krisis ekonomi Asia tahun 1998 era desentralisasi fiskal, hingga masa pandemi COVID-19 yang masih jarang dianalisis secara terpadu dalam satu kerangka penelitian. Penggabungan tiga variabel tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan indeks pembangunnn manusia secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan dengan pendekatan VECM mampu memisahkan dinamika jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang sekaligus menelusuri arah hubungan kausalitas antarvariabel. Oleh karena itu, dapat memberikan tambahan bukti empiris menjadi bahan pertimbangan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta adanya perbedaan temuan penelitian mengenai variabel-variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka,

kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan nyata serta dibagikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Penelitian bisa digunakan untuk perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan, dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
2. Bagi sektor swasta, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.